BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

1. Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung cukup baik. Hal ini telah didukung dengan unsur sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung telah dipraktekkan walaupun belum sesuai dengan kriteria yang ada.
2. Prinsip pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung berjalan cukup baik. Hal ini telah diberlakukannya prinsip pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung walaupun belum berjalan optimal.
3. Kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Pemerintah Kota Bandung cukup baik. Hal ini didukung dengan kualitas laporan keuangan daerah telah dilakukan secara relevan, andal dan dapat dibandingkan sehingga kualitas laporan keuangan

dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung sudah berjalan cukup baik.

4. Secara parsial sistem pengendalian intern memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,657% dibanding pengelolaan keuangan daerah yang memberikan pengaruh sebesar 0,240%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) di Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan memberikan pengaruh sebesar 73,30% terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) di Pemerintah Kota Bandung dan sisanya sebesar 26,70% dipengaruhi faktor lain seperti sistem akuntansi dan standar akuntansi pemerintahan.

5.2 Saran

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung harus membuat SOP yang formal untuk prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga ada kejelasan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Disamping hal itu, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung harus memperbaiki kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, sehingga tidak adanya lagi belanja dilur mekanisme APBD.
2. Untuk mengatasi pemborosan keuangan daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam hal pengadaan barang/jasa dengan menetapkan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan sesuai standar, mengurangi pemborosan atau harga yang kemahalan, serta pemantauan yang ketat dan transparan.
3. Karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung harus melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesauaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru dan proses sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga tidak ada lagi praktek-praktek yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.